

ANALISA

1975



ANALISA

TERUSAN SUEZ & BANGSA PALESTINA

PENGANTAR PENERBIT

Berhubung dengan pentingnya dan cepatnya perkembangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dalam rangka hubungan internasional maka penerbit merasa perlu untuk menyajikan beberapa tulisan berkenaan dengan masalah-masalah yang berkembang di sekitar pertikaian Arab-Israel dalam penerbitan Analisa bulan Juli 1975 ini.

Penerbitan kali ini memuat tulisan Kirdi DIPOYUDO sehubungan dengan dibukanya Terusan Suez tanggal 5 Juni 1975 yang lalu dalam artikelnya "TERUSAN SUEZ DAN ARTINYA". Tulisan tersebut berusaha untuk menggambarkan sejarah perkembangan; arti pembukaan terusan baik dari aspek ekonomi, politik maupun strategi di bidang pertahanan-keamanan; dan juga memaparkan permasalahan yang diperkirakan akan timbul ataupun yang sudah terjadi. Di samping itu disampaikan pula ulasan G. Abdul FACHMAN sehubungan dengan perkembangan perjuangan bangsa Palestina dalam tulisannya "DERAP JUANG BANGSA PALESTINA". Bangsa Palestina telah berkembang dari unsur su-byek menjadi obyek yang senantiasa harus ikut diperhitungkan dalam perkembangannya. Kesadaran bangsa Palestina dalam usahanya untuk kembali ke kampung halamannya telah meningkat sedemikian rupa; sehingga masalahnya tidaklah dapat diselesaikan hanya oleh kesepakatan yang mungkin dapat dicapai di antara Mesir, Israel, Uni Soviet ataupun Amerika Serikat saja, tapi lebih penting lagi adalah sikap dan pendirian bangsa Palestina sendiri.

Penerbitan Analisa bulan Juli ini karena beberapa masalah teknis terpaksa mengalami keterlambatan sehingga tulisan-tulisan yang dimuatkan dalam penerbitan kali ini mungkin saja tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini yang begitu cepat, namun sebagai bahan dasar untuk memahami perkembangan yang terdapat di kawasan Timur Tengah kiranya ia senantiasa merupakan bahan yang berguna.

DAFTAR ISI

	Kal.
<u>Pengantar Penerbit</u>	i
<u>Terusan Guez dan Artinya</u>	
Kirdi DEFOYUDO	3
<u>Derap Juang Bangsa Palestina</u>	
O. Abdul RACHMAN	23

Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat



TERUSAN SUEZ DAN ARTINYA

Kirdi DIPOYUDO

Bing P. LUKMAN (ed.)

Pengantar

Meskipun berdasarkan persetujuan peleraian pasukan Israel-Mesir 18 Januari 1974 pasukan Israel hanya ditarik mundur sejauh 21 km dari Terusan dan dari kedudukan ini masih dapat melancarkan serangan dan mengganggu lalu-lintas pelayaran di Terusan Suez, namun Presiden Sadat pada tanggal 29 Maret 1975 tetap mengumumkan keputusan Pemerintah Mesir untuk membuka kembali Terusan Suez pada tanggal 5 Juni 1975, dan memerintahkan persiapan pembukaan kembali Terusan tersebut.

Pembukaan Terusan Suez tersebut merupakan suatu kejadian yang penting dan menarik perhatian, dan menjadi tema tulisan kali ini. Secara berturut-turut akan dibahas arti Terusan Suez bagi Mesir, perdagangan internasional maupun bagi strategi global negara-negara super-powers Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sedang berlomba kekuatan militer di kawasan Samudera Hindia. Sebagai pangkal tolak untuk memahami arti Terusan tersebut terlebih dahulu dibicarakan sejarah penggalian serta perkembangannya, keadaan fisik pada permulaan maupun sekarang, serta masalah pemilikan dan operasinya baik sebelum maupun sesudah nasionalisasi Perusahaan Terusan Suez.

I. Sejarah

Terusan Suez adalah jalan air buatan manusia yang memotong tanah genting Suez dan menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah, digali pada tahun 1859 dan dibuka untuk pelayaran internasional pada tahun 1869. Namun berabad-abad sebelumnya orang telah memikirkan untuk membangun terusan serupa, bahkan sekitar abad ke-20 atau 19 sebelum Masehi telah digali suatu terusan yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah, sehingga memungkinkan orang berlayar dari Laut Tengah ke Laut

Merah, akan tetapi kemudian rusak. Terusan tersebut kemudian digali kembali oleh Necho (610-595), Darius Agung (522-486), dan Ptolomeus II (285-246), dan demikian seterusnya pada abad-abad berikutnya jalan air tersebut dirubah, dirusak, dibangun kembali dan akhirnya dihancurkan oleh Kalif Abu Ja'far Abdullah al Mansur menjelang akhir abad ke-8 setelah Masehi¹.

Seribu tahun kemudian pada akhir abad ke-18 orang mulai memikirkan lagi untuk membangun terusan yang akan menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah ketika Napoleon Bonaparte memimpin suatu ekspedisi militer di Mesir pada akhir abad ke-18. Napoleon membatalkan keinginannya karena khawatir bahwa air Laut Merah yang diperkirakan permukaannya lebih tinggi dari Laut Tengah akan menggenangi lembah Mesir. Barulah 70 tahun kemudian seorang Perancis lain, Ferdinand de Lesseps, membuktikan kepada dunia bahwa gagasan tersebut dapat diwujudkan.

30 Nopember 1854 Ferdinand de Lesseps yang penuh inisiatif, energi dan ulet berhasil mendapatkan konsesi raja muda Mesir Mohammad Said Pasha (1854-1863) untuk membangun dan mendirikan suatu perusahaan internasional untuk mengurusnya setelah mengatasi berbagai rintangan terutama tentangan dari pihak pemerintah Inggris². Konsesi tersebut berlaku untuk 99 tahun sejak dibukanya terusan, dan setelah itu menjadi milik pemerintah Mesir dengan imbalan ganti rugi bagi kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Pemerintah Mesir akan menerima 15% dari perhitungan keuntungan tahunan di samping dividen saham-saham yang dipegangnya. Terusan akan terbuka bagi kapal-kapal semua negara atas dasar persamaan. Konsesi tersebut disusul dengan konsesi lain pada tanggal 5 Januari 1856 yang menetapkan secara lebih terperinci hak-hak dan kewajiban di antara pemerintah Mesir dan Perusahaan Terusan. Konsesi ini memerlukan ratifikasi Sultan Istambul yang tidak segera memberikannya, karena adanya tentangan dari pihak Inggris yang mempunyai pengaruh besar di Istambul terutama sejak krisis Rusia-Turki tahun 1853 yang meningkat menjadi perang Krimea (1854-1856). Namun De Lesseps meneruskan usahanya dan pada tahun 1858 mendirikan Perusahaan Terusan Suez (Compagnie

¹ Lihat "Suez Canal", dalam Encyclopaedia Americana, XXV (New York, 1971), hal. 799.

² Tentang pembangunan Terusan Suez lihat G. Lenczowski, The Middles East in World Affairs (London, 1962³), hal. 609-612; William F. Longgood, The Suez Story (New York, 1957).

Universelle du Canal Maritime de Suez) yang saham-sahamnya dibeli oleh Pemerintah Mesir dan asing, terutama Perancis.

Tahun 1859 sekalipun belum ada ratifikasi, penggalian terusan mulai dilakukan. Penggalian terusan ini menghadapi banyak kesulitan antara lain karena keadaan tanahnya yang terdiri dari gurun pasir. Untuk mengatasinya terlebih dahulu harus digali terusan penunjang sedalam 20 kaki guna lalu-lintas pengangkutan bahan-bahan bangunan yang diperlukan. Air minum untuk kebutuhan sekitar 60.000 orang pekerja didatangkan dari sungai Nil melalui terusan lain yang menyusur mulai dari Bulaq di dekat Kairo memotong gurun menuju Ismailia, dan dari situ bercabang menuju ke Port Said dan kota Suez. Terusan ini kemudian dipergunakan pula untuk pengairan daerah di sekitarnya yang merubah daerah gurun tandus menjadi suatu daerah pertanian dan suatu propinsi yang subur dengan sekitar 500.000 orang penduduk. Selain itu terusan juga berfungsi sebagai jalan air yang menghubungkan Ismailia dengan Kairo.

Hingga tahun 1866 De Lesseps menghadapi periode yang menghabiskan waktu dan pikirannya untuk memecahkan masalah-masalah teknis, finansial, diplomatik dan keadaan menjadi lebih sulit ketika Said Pasha meninggal pada tahun 1863 dan digantikan oleh Ismail Pasha. Namun pada 30 Januari 1866 akhirnya De Lesseps berhasil mendapatkan konsesi baru dari Ismail Pasha setelah berhasil menahan tentangan Inggris dan mendapatkan pengesahan dari Sultan Istambul pada tanggal 19 Maret 1866. Konsesi ini mengukuhkan konsesi-konsesi sebelumnya dan ditambah pula dengan beberapa ketentuan, antara lain ketentuan bahwa Perusahaan Terusan Suez adalah merupakan Perusahaan Mesir, dan selain itu Mesir bebas dari kewajiban untuk menyediakan $\frac{4}{5}$ dari tenaga kerja dengan memberikan ganti rugi kepada Perusahaan Terusan, tenaga-tenaga kerja manusia tersebut digantikan dengan mesin-mesin. Sejak itu pekerjaan berjalan lancar dan 17 Nopember 1869 Terusan Suez dibuka secara resmi untuk pelayaran internasional.

Sementara itu Inggris karena menyadari arti terusan tersebut sebagai rute komersial dan strategis telah merubah sikapnya dan tidak hanya menghentikan tuntutannya melainkan juga berusaha untuk mendapatkan pengaruh. Oleh karena itu, ketika Pemerintah Mesir untuk mengatasi kesulitan keuangannya menawarkan saham yang dimilikinya, PM Inggris Disraeli tanpa berpikir panjang memutuskan untuk membelinya, yaitu 172.602 saham dari 400.000 seluruh saham Perusahaan Terusan Suez, dan dengan

demikian menjadi pemegang saham utama sekalipun mayoritas jumlah saham masih berada di tangan orang-orang Perancis. Selanjutnya dengan dalih menyelesaikan pemberontakan Arabi Pasha terhadap Pemerintah Mesir (1882) Inggris berhasil menduduki negeri itu dan dengan demikian membentuk mata rantai baru dalam komunikasi imperialisnya dengan menguasai Terusan Suez. Operasi terusan tetap berada di tangan Perusahaan Terusan Suez, akan tetapi sebagai negara yang de facto berkuasa atas Mesir maka Inggris mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan dalam keadaan perang dapat menutup terusan tersebut bagi musuh-musuhnya¹. Kekuasaan itu baru berakhir pada tanggal 1 Juni 1956 ketika pasukan Inggris meninggalkan daerah Suez berdasarkan persetujuan Inggris-Mesir tahun 1954.

Pada tanggal 29 Oktober 1956 Israel melakukan penyerangan atas Mesir dan dalam beberapa hari pasukannya telah berhasil menguasai tepi timur terusan. Dengan dalih untuk menyelamatkan jalan air tersebut bagi pelayaran internasional Inggris dan Perancis mendaratkan pasukannya dan menduduki daerah Suez. Sebagai reaksi Mesir menenggelamkan kapal-kapal yang menyebabkan terusan menjadi tertutup, dan baru lima bulan kemudian setelah pasukan-pasukan Inggris, Perancis dan Israel ditarik mundur dari wilayah Mesir terusan kembali dibuka untuk pelayaran. Namun pada akhir tahun 1967 Mesir menutupnya kembali ketika sekali lagi Israel menyerbu dan menguasai tepi timur terusan dan sejak itu jalan air tersebut hanya berfungsi sebagai garis demarkasi Israel-Mesir².

Setelah pada tanggal 18 Januari 1974 persetujuan peleraian pasukan Israel-Mesir ditanda-tangani dan pasukan Israel ditarik mundur 13 mil (= 21 km) dari Terusan, pemerintah Mesir segera mempersiapkan pembukaan kembali Terusan Suez. Bulan September 1974 diumumkan bahwa pembersihan terusan dari bangkai-bangkai kapal, ranjau laut dan darat, roket-roket anti-tank, tank, pesawat-pesawat dan potongan-potongan jembatan penyeberang perbekalan dan pasukan, serta juga lumpur yang telah mengendap selama 7 tahun akan dapat diselesaikan bulan Nopember dan terusan akan dibuka kembali sekitar bulan Maret 1975 dengan syarat pasukan Israel harus ditarik mundur lebih jauh terutama dari celah-celah Gidi dan Mitla. Proses pembersihan terusan

¹ Tentang hubungan Inggris dengan Terusan Suez lihat Moustapha el Hafnaoui, *Les problèmes contemporains posés par la Canal de Suez* (Paris, 1951).

² Lihat G. Lenczowski, *op. cit.* hal. 626.

tersebut berlangsung lebih dari setahun dikerjakan oleh regu-regu Mesir dengan bantuan tenaga ahli dan peralatan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Perancis. Untuk keperluan tersebut Mesir telah mengeluarkan biaya sekitar US\$ 232 juta sedangkan Amerika Serikat sekitar US\$ 20 juta. Meskipun perundingan untuk memenuhi tuntutan persyaratan tersebut gagal namun pada tanggal 29 Maret 1975 Presiden Sadat mengumumkan keputusan Pemerintah Mesir mengenai dibukanya terusan kembali bagi pelayaran internasional pada tanggal 5 Juni 1975¹.

II. Keadaan phisik

Panjang Terusan Suez adalah 101 mil (= ± 162 km) membujur dari Port Said di ujung utara sampai ke kota Suez di ujung selatan di Laut Merah. Kapal yang berlayar dari utara akan melewati Port Said, sebuah pelabuhan terbesar di dunia dengan fasilitas gudang dan perbekalan serta reparasi yang lengkap. Dari Port Said kemudian melintasi daerah rawa-rawa danau Manzala. Tigapuluh mil ke arah selatan dari Port Said terdapat suatu bypass, digali tahun 1949-1951, untuk memungkinkan konvoi kapal saling berpapasan dengan aman. Kurang lebih di pertengahan antara Port Said dengan Suez Terusan memotong danau Timzah dan menyusur kota Ismailia di tepinya di mana terdapat kantor-kantor administrasi terusan. Kemudian secara berturut-turut akan melewati danau Pahit, daerah gurun dan tiba di Port Taufik sebuah terminal di ujung selatan yang terletak beberapa mil dari kota Suez (lihat peta). Paralel dengan terusan tersebut di sebelah barat sepanjang terusan terdapat pula kanal saluran air tawar, jalan kereta api dan jalan raya dua jalur yang menghubungkan Port Said, Ismailia dan kota Suez. Kecepatan kapal yang melewati Terusan ditetapkan 13 km per jam untuk kapal tanki dan 14 km per jam untuk kapal-kapal sarat muatan lainnya².

Sejak pembukaannya yang pertama kali hingga kini Terusan Suez telah mengalami banyak perubahan, perbaikan dan modernisasi sesuai dengan tuntutan navigasi dan laju lalu-lintas

¹ Lihat Indonesian Observer, 1 April 1975; "The Suez Canal", dalam The Middle East and North Africa 1974-1975 (London, 1975), hal. 100.

² Lihat "Suez Canal", ibid. hal. 800.



Source: Newsweek, 4 March 1974.

pelayaran. Sampai dengan tahun 1954 telah dilaksanakan 7 kali perbaikan baik berupa pelebaran maupun pengerukan. Pada waktu terusan tersebut pertama kali dibuka lebarnya di permukaan adalah 200 kaki (= 60,96 m) dan 72 kaki (= 21,94 m) di dasarnya pada kedalaman 26 kaki (= 7,92 m) sedangkan kedalaman maksimal kapal yang dapat melewatinya adalah 24,6 kaki (= 7,49 m) dengan kecepatan berlayar 6,21 mil per jam (= 10 km/jam). Sampai tahun 1954 telah dilaksanakan 7 kali perbaikan berupa pelebaran, pengerukan, sehingga pada tahun 1956 ketika nasionalisasi terusan, lebarnya telah menjadi 500 kaki (= 152,4 m) di permukaan dan 196 kaki (= 59,74 m) di dasar pada kedalaman 33 kaki (= 10,05 m), tetapi dengan alur pelayaran sedalam 45 kaki (= 13,71 m) sehingga memungkinkan pelayaran kapal dengan kedalaman maksimal kapal menjadi 35 kaki (= 10,66 m)¹.

Sebelum nasionalisasi terusan dilakukan, perbaikan yang ke delapan sedang akan mulai dilaksanakan. Dengan adanya nasionalisasi maka rencana tersebut dirubah dan lebih disempurnakan untuk mencapai hasil yang lebih baik agar dapat dilayari oleh kapal-kapal tanki yang lebih besar dan diberi nama Proyek Nasser. Di dalam proyek tersebut terkait pula rencana pembangunan jembatan kereta api pada kilometer 68,15 dari Port Said serta suatu pusat penelitian di Ismailia. Tahap pertama dari proyek Nasser tersebut selesai pada tahun 1961 sehingga dapat dilayari oleh kapal-kapal dengan kedalaman maksimal sampai 37 kaki (= 11,27 m). Pada tahun 1964 tahap kedua selesai dengan kemampuan untuk dilayari kapal-kapal dengan kedalaman maksimal 38 kaki (= 11,58 m) yaitu kapal-kapal dengan sarat muatan sebesar 60.000 ton atau kapal-kapal dengan balas sebesar 150.000 ton. Terusan tersebut sejak tahun 1962 juga memiliki dua stasiun radio penyelamat dan sistim hubungan radio antara kapal dengan stasiun pengawas lalu-lintas di Ismailia².

Dengan pembukaan kembali terusan maka untuk beberapa bulan pertama ini diperkirakan bahwa terusan hanya akan dapat menampung kapal-kapal dengan sarat muatan sampai 40.000 ton dan lambat laun baru akan kembali kepada kapasitasnya semula seperti waktu sebelum ditutup. Sebelum Terusan ditutup orang

¹ Lihat "The Suez Canal", dalam The Middle East and North Africa 1974-1975 (London, 1975), hal. 100; "Suez Canal", ibid. 800.

² Lihat "The Suez Canal", ibid. 100.

telah mulai memikirkan pembuatan kapal-kapal tanki sebesar 100.000 ton atau lebih yang dalam keadaan sarat muatan tidak dapat mempergunakan terusan. Dengan penutupan terusan maka untuk menekan biaya pengangkutan makin banyak dibangun kapal-kapal dengan ukuran tonase besar terutama untuk jenis kapal tanki. Bahkan sementara orang mengatakan, bahwa pengangkutan minyak dari Teluk Parsi ke Eropa melalui Tanjung Tarapan¹ dengan kapal-kapal tanki raksasa di atas 250.000 ton adalah lebih murah sekitar \$ 0,96 per ton dibandingkan dengan penggunaan kapal tanki sampai sebesar 60.000 ton melalui Terusan Suez. Kalau pada tahun 1967 sekitar 74% kapal-kapal tanki di dunia dapat melewati Terusan Suez, maka dewasa ini hanya sekitar 27% yang dapat melewatinya. Karena itu diperkirakan bahwa Terusan Suez tidak akan seramai seperti sebelum penutupan, paling tidak untuk sementara waktu.

Orang-orang Mesir juga telah memperhatikan kenyataan-kenyataan perkembangan baru tersebut, dan oleh karena itu mereka menyusun suatu rencana baru untuk memperlebar dan memperdalam terusan agar dapat dilayari oleh kapal-kapal tanki raksasa. Rencana tersebut akan dikerjakan dalam dua tahap, masing-masing 3 tahun lamanya. Diperkirakan pada tahun 1970 setelah tahap pertama selesai, lebar terusan di permukaan akan menjadi sekitar 520 kaki (= 158,49 m) dengan kedalaman 62 kaki (= 18,89 m) sehingga dapat menampung kapal-kapal sarat muatan sampai 150.000 ton atau kapal-kapal dengan balas sampai 300.000 ton. Apabila perbaikan tahap kedua selesai, yaitu sekitar tahun 1981, diharapkan terusan dengan kedalaman 77 kaki (= 23,46 m) dapat menampung kapal-kapal tanki dengan sarat muatan sampai sebesar 260.000 ton atau sekitar 92% dari kapal-kapal tanki dunia².

Rencana pelebaran dan pengerukan terusan tersebut hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan rencana pembangunan daerah Suez yang diperkirakan keseluruhannya akan menelan biaya sekitar \$ 10.000 juta. Untuk maksud itulah maka Presiden Sadat pada akhir bulan Oktober 1973, beberapa hari setelah perang Arab-Israel mereda, mengangkat Osman Ahmed Osman menjadi Menteri Rekonstruksi dan Rehabilitasi dan menjelaskan mengenai garis-garis besar rencana yang diinginkannya.

¹ Lihat resensi buku Noël Mostert, Supership, oleh John Raedler dalam The Australian Weekend, 1 Februari 1975.

² Lihat "A Man, a Plan, a Canal - and Peace?", dalam Newsweek, 4 Maret 1974, hal. 12-13.

Osman segera membuka suatu "Central Operation Room" dan membujuk staf ahli untuk menyusun rencana yang lebih konkrit dan mendetail (lihat peta). Menurut rencana itu, Port Said, Ismailia dan Suez, yang sebagian besar rusak dan ditinggalkan oleh kebanyakan penduduknya dalam perang "attrition" 1968-1970 dan perang Yom Kippur 1973, akan dibangun kembali. Ismailia akan dibangun menjadi suatu pusat pariwisata, Port Said dan Suez menjadi pelabuhan bebas yang ultra modern dilengkapi dengan lapangan terbang internasional, sebagaimana halnya peranan Hongkong dan Singapura dewasa ini. Seluruh daerah Suez akan menjadi sebuah kota raksasa sepanjang \pm 160 km yang akan meliputi 3 kota besar dengan 5 buah pelabuhan. Semuanya itu digabungkan dengan suatu jalur industri dan pertanian yang membujur di sepanjang kedua tepi Terusan, dan dihubungkan dengan suatu jalan raya delapan jalur dan jalan kereta api serta 5 buah terowongan di bawah terusan.

Sementara ahli meragukan kemampuan Mesir untuk melaksanakan rencana pembangunan raksasa tersebut, tetapi orang-orang Mesir sendiri percaya akan dapat melakukannya, bahkan berbagai pihak telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan pinjaman, antara lain Iran, Arab Saudi, Kuwait dan Abu Dhabi. Rencana tersebut sendiri telah disahkan oleh Presiden Sadat dan mulai dikerjakan. Tenaga-tenaga kerja dikerahkan ke kota-kota sepanjang terusan tersebut untuk membersihkan puing-puing dan memperbaiki gedung-gedung lama yang masih dapat diselamatkan serta mendirikan gedung-gedung baru. Penduduk lama telah mulai kembali ke tempatnya semula dan dengan demikian diharapkan kota-kota lama yang ditinggalkan dan sudah setengah mati akan menjadi hidup kembali. Banyak investor asing tertarik oleh sikap terbuka Pemerintah Mesir dan fasilitas-fasilitas yang disediakan¹.

III. Pemilikan dan operasi

Berdasarkan konsesi raja muda Mesir kepada Ferdinand de Lesseps maka Terusan Suez merupakan milik Perusahaan Terusan Suez yang berstatus swasta Mesir, namun mempunyai sifat internasional. Sebagian terbesar sahamnya berada di tangan orang

¹ Lihat "A Man, a Plan, a Canal - and Peace?", dalam Newsweek, 4 Maret 1974, hal. 12-13; Anthony Hewett, "The Canal Zone comes to life again", GEMINI, yang dimuat dalam The Indonesia Times, 20 Desember 1974.

asing terutama Perancis. Pemerintah Mesir hanya memiliki 40% yang kemudian telah dijual kepada Inggris. Sebagai perusahaan swasta maka harus tunduk kepada perundang-undangan dan kedaulatan Mesir, namun berdasarkan kenyataan jalan air tersebut untuk pelayaran internasional dan berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan internasional, maka perusahaan tersebut mendapatkan status khusus. Hal ini tidak hanya terungkap dari namanya "Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez" (Perusahaan Universal Terusan Maritim Suez), tetapi juga terungkap dari susunan pimpinan perusahaan tersebut (1949) yang terdiri dari 32 orang anggota Dewan Direktur yaitu 19 orang Perancis, 10 orang Inggris, 2 orang Mesir dan 1 orang Belanda¹. Perusahaan Terusan Suez mengelola Terusan tersebut secara otonom, menetapkan dan memungut bea transit, merawat dan memperbaiki, mengatur lalu lintas serta keamanannya, mengangkat pemandu-pemandu dan lain sebagainya. Dari keuntungan hasil operasi 15% diserahkan kepada pemerintah Mesir, sebagian lagi dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan sisanya dipergunakan untuk meningkatkan terusan bila dianggap perlu.

Hubungan antara Perusahaan Terusan Suez dengan Pemerintah Mesir ditetapkan dalam akte-akte berbagai konvensi². Berdasarkan Konvensi 21 Maret 1880 Mesir menyerahkan bagian dari keuntungan yang diterimanya kepada "Credit Foncier de France" yang mendirikan sebuah perusahaan sebagai penyalur kredit kepada pengusaha-pengusaha Mesir. Berdasarkan konvensi maka Terusan mempunyai kedudukan khusus. Hal tersebut dikukuhkan melalui konvensi Istanbul pada tahun 1888 yang ditanda-tangani oleh sejumlah negara pemakainya yaitu Perancis, Jerman, Spanyol, Italia, Belanda, Rusia, Turki, Austria dan Hongaria. Pasal 1 Konvensi Istanbul menetapkan bahwa Terusan terbuka bagi kapal-kapal dagang maupun perang semua negara, baik dalam waktu damai maupun perang. Para peserta konvensi berjanji tidak akan melanggar ketentuan itu dan tidak akan mengenakan blokade terhadapnya. Pasal-pasal lain melarang segala macam bentuk permusuhan di Terusan tersebut, di pelabuhan-pelabuhan masuk ke luar serta 3 mil dari perairan di sekitarnya. Negara-negara yang sedang terlibat peperangan tidak dilarang menggunakan terusan, tetapi untuk mencegah terjadinya pertempuran di

¹ Lihat G. Lenczowski, *op. cit.* hal. 620.

² Tentang hubungan antara Perusahaan Terusan Suez dan Mesir lihat G. Lenczowski, *op. cit.* hal. 619-622; lihat lebih lanjut The Suez Canal. A Selection of Documents Relating to the International Status of the Suez Canal and the Position of the Suez Canal Company (London - New York, 1956).

perairan tersebut, maka mereka harus mematuhi berbagai pembatasan. Pasal 10 konvensi tersebut menyatakan memberikan hak kepada Mesir dan Turki untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi pertahanan dan ketertibannya, sedangkan pasal 11 menetapkan bahwa tindakan tersebut namun tidak boleh mengganggu dan atau menghambat kelancaran lalu-lintas pelayaran secara bebas. Pasal 14 selanjutnya menetapkan bahwa azas kebebasan lalu-lintas pelayaran bersifat tetap dan tidak terbatas pada waktu berlakunya konvensi sendiri. Di sini jelas bahwa Konvensi Istanbul menetapkan azas kebebasan lalu-lintas pelayaran bagi kapal-kapal semua bangsa, tetapi tidak mewajibkan sikap netral pihak Mesir dan ataupun Turki sebagai negara yang 'berdaulat dan memiliki' Terusan¹. Sedangkan Konvensi tahun 1920 memasukkan perumahan personil perusahaan dalam daftar inventaris perlengkapan yang harus diganti oleh Mesir pada saat berakhirnya konsesi.

Pada tahun 1936 ditanda-tangani persetujuan di antara Inggris dan Mesir yang mengakhiri pendudukan Mesir oleh tentara Inggris. Pasal 6 persetujuan itu menetapkan status Terusan Suez sebagai bagian integral wilayah Mesir, namun menugaskan Inggris untuk melindunginya sampai disetujui bersama bahwa angkatan bersenjata Mesir telah mampu melakukannya sendiri. Sehubungan dengan itu orang Inggris diperkenankan menempatkan 10.000 tentara dan 400 orang penerbang di daerah Suez dan Mesir diwajibkan menyediakan perumahan bagi mereka. Pemerintah Mesir dan Perusahaan Terusan Suez mengadakan suatu konvensi baru yang mengatur antara lain mengenai pembebasan bea-cukai, pemeliharaan kota Ismailia dan pembayaran 300.000 pond Mesir setahun oleh perusahaan kepada pemerintah Mesir, pengelolaan tetap berada di tangan perusahaan namun pemerintah Mesir mengatur pengawasan polisi, bea-cukai dan kesehatan.

Tahun 1949 dibuat sebuah konvensi baru yang pada hakikatnya merupakan penyesuaian konvensi-konvensi sebelumnya dengan undang-undang baru Mesir tentang pengaturan perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di wilayahnya. Antara lain ditetapkan, bahwa perusahaan harus melakukan "Mesirisasi personil" secara berangsur kecuali pemandu-pemandu dan personil maritim. Anggota Dewan Pimpinan orang Mesir harus ditingkatkan dari 2 orang menjadi 4 orang dan pada tahun 1964 mencapai jumlah 7 orang, sedangkan jumlah orang asingnya terdiri dari 30 orang,

¹ Lihat G. Lenczowski, *op. cit.* hal. 629; lihat juga J.L. Brierly, *The Law of Nations* (Oxford, 1963⁶), hal. 233-234.

terdiri dari 10 orang Perancis, 10 Inggris, 1 Belanda dan 1 Amerika Serikat. Perusahaan berkewajiban menyerahkan 7% dari keuntungan kotor dengan minimum 350.000 pond Mesir kepada pemerintah Mesir dan membebaskan kapal-kapal kecil berbendera Mesir dari bea transit.

Tahun 1954 Inggris dan Mesir menanda-tangani persetujuan baru menggantikan persetujuan tahun 1936 berlaku untuk 7 tahun dan sesudah itu dapat diperpanjang. Berdasarkan persetujuan tersebut maka pasukan Inggris dalam waktu 20 bulan ditarik mundur sehingga pada tanggal 19 Juni 1956 Mesir mendapatkan kembali kekuasaan militernya atas terusan tersebut dan merupakan satu-satunya penjaga terusan. Akan tetapi Inggris diberi hak untuk memasuki wilayah Mesir dengan menggunakan fasilitas-fasilitas militernya "jika terjadi suatu serangan bersenjata oleh negara asing atas Mesir, atau negara yang pada waktu penanda-tanganan persetujuan adalah anggota persetujuan pertahanan bersama negara-negara Liga Arab, atau atas Turki". Dan ditetapkan pula bahwa perawatan terusan akan dilakukan oleh teknisi sipil Inggris di bawah pengawasan Mesir. Sesudah tahun 1963 Mesir akan menjadi pengelola tunggal dan mengambil alih tanggung jawab operasi teknisnya yang sebelumnya ditangani oleh teknisi barat. Proses ini dipercepat oleh perkembangan-perkembangan sekitar tahun 1956.

Pada tanggal 19 Juli 1956 sebagai reaksi atas kecaman-kecaman yang dilakukan oleh Presiden Nasser, Amerika Serikat menarik janjinya untuk memberikan bantuan sebesar US\$ 56 juta guna membiayai Bendungan Aswan. Uni Soviet melalui Menteri Luar Negerinya pada tanggal 21 Juli 1956 menyatakan pula bahwa Uni Soviet tidak akan memberikan bantuan kepada Mesir sehubungan dengan proyek tersebut. Presiden Nasser menilai tindakan Amerika Serikat tersebut sebagai penghinaan terhadap martabat Mesir dan mengumumkan keputusan untuk menasionalisir Perusahaan Terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956. Pemerintah Mesir akan memberikan ganti rugi kepada para pemegang saham dan membentuk suatu badan otonom untuk mengelola Terusan dan pendapatan dari terusan akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan bendungan Aswan¹.

¹ Tentang nasionalisasi Perusahaan Terusan Suez oleh Mesir lihat lebih lanjut karya Peter Calvocoressi, Suez: Ten Years After (New York, 1967); lihat juga The Suez Canal. A Selection of Documents Relating to the International Status of the Suez Canal and the Position of the Suez Canal Company (London - New York, 1956), hal. 41 dan seterusnya.

Inggris dan Perancis sebagai pemegang saham perusahaan terbesar menilai tindakan nasionalisasi tersebut tidak hanya sebagai perampasan kekayaan perusahaan secara tidak adil tetapi juga sebagai suatu tindakan yang melanggar watak internasional terusan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas di terusan tersebut. Inggris dan Perancis menyiapkan angkatan perangnya dan mengancam untuk menggunakan kekerasan guna memaksa Mesir membatalkan nasionalisasi tersebut. Amerika Serikat sekalipun ikut mengecam tindakan nasionalisasi tersebut namun berusaha untuk menempuh cara lain dan menasehati Inggris dan Perancis untuk tidak mempergunakan kekerasan. Atas inisiatif Amerika Serikat diadakan pertemuan 21 negara pemakai terusan pada tanggal 16 Agustus 1956 di London. Uni Soviet menolak hadir dalam pertemuan tersebut, namun 18 negara dalam pertemuan di London berhasil mencapai kata sepakat untuk membentuk suatu badan internasional guna menangani urusan terusan, dan suatu komisi terdiri dari 5 negara ditugaskan untuk mengadakan perundingan dengan Mesir. Perundingan macet karena Presiden Nasser menuntut kedaulatan penuh atas terusan dan menolak setiap kompromi.

Pada tanggal 12 September 1956 diputuskan membentuk suatu perhimpunan negara-negara pemakai Terusan (Canal's Users Association) yang terlaksana pembentukannya pada tanggal 1 Oktober 1956 terdiri dari 15 negara anggota yang bertugas menolong anggota-anggota perhimpunan menggunakan terusan serta membantu PBB mencari penyelesaian sementara serta masalah-masalah ekonomi lainnya akibat pelarangan penggunaan Terusan tersebut dan juga mencari alternatif lain untuk mengurangi ketergantungan mereka atas terusan itu.

Inggris dan Perancis masih belum merasa puas dan pada tanggal 23 September 1956 mengajukan persoalan tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Dalam perdebatan umum di forum tersebut Sekjen PBB Dag Hammarskjöld mengajukan suatu formula penyelesaian yang berhasil disetujui oleh Mesir, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat pada tanggal 13 Oktober 1956 mencakup enam azas sebagai berikut: 1) kebebasan lalu-lintas bagi kapal-kapal semua negara tanpa perkecualian; 2) menghormati kedaulatan Mesir atas terusan; 3) penisahan masalah operasi Terusan dari masalah politik negara manapun; 4) menetapkan bea transit dan iuran bersama-sama antara Mesir dengan para pemakai terusan; 5) penggunaan pemasukan bea transit untuk pengembangan terusan dan 6) bila timbul sengketa antara Pemerintah Mesir dengan Perusahaan Terusan Suez diselesaikan melalui arbitrase.

Semula usul resolusi Dewan Keamanan PBB di samping mencakup keenam asas tersebut dikaitkan pula dengan seruan kepada Mesir untuk menerima rumusan 18 negara mengenai kekuasaan internasional bagi Terusan Mesir dan Uni Soviet berkeberatan atas pengkaitan tersebut, sehingga diadakan pemungutan suara atas kedua bagian tersebut secara terpisah. Bagian pertama yang memuat keenam asas diterima secara unanims, namun bagian kedua ditolak dengan veto Uni Soviet yang memihak kepada Mesir.

Sekalipun keenam asas diterima Dewan Keamanan PBB, namun Inggris dan Perancis merasa sangat kecewa karena tidak adanya badan yang melaksanakannya. "Perhimpunan Pemakai Kanal" (Canal's User Association) yang merasa berhak untuk menarik bea transit menjadi tidak jelas kedudukannya karena Mesir tidak mengakui hak-hak dan eksistensinya, sehingga dengan demikian Mesir menjadi satu-satunya wasit dalam menentukan pelaksanaan keenam asas tadi. Hal inilah yang merupakan latar belakang diselenggarakannya perundingan-perundingan London-Paris yang menelorkan keputusan untuk menggunakan kekerasan terhadap Mesir. Keputusan tersebut direalisasi melalui intervensi militer Inggris dan Perancis ketika meletus perang Mesir-Israel pada tanggal 28 Oktober 1956 dengan dalih untuk menyelamatkan Terusan bagi pelayaran internasional.

Sebagai reaksi, Mesir menutup terusan dengan menenggelamkan kapal-kapal dan menghancurkan beberapa instalasi-instalasi di sepanjang terusan. Lima bulan kemudian karena tekanan PBB, Uni Soviet dan Amerika Serikat, maka pasukan-pasukan Inggris, Perancis dan Israel ditarik kembali dan Terusan Suez diserahkan di bawah pengawasan PBB dan dibuka kembali. Persoalan yang masih tertinggal adalah masalah ganti rugi yang kemudian berhasil diselesaikan dalam persetujuan tanggal 29 April 1958 antara pihak Mesir dengan pihak-pihak pemegang saham. Mesir menyatakan bersedia membayar ganti rugi sebesar 28,3 juta pond Mesir dalam waktu lima tahun¹. Dengan demikian pemerintah Mesir menjadi pemilik perusahaan Terusan Suez dan mendapatkan hak untuk mengkaryakan serta mengelolanya. Untuk maksud tersebut dibentuk Otoritas Terusan Suez (Suez Canal Authority) yang bertindak atas nama pemerintah. Berlainan dengan dugaan negara-negara barat, Mesir berhasil mengelola dan menjaga kelancaran

¹ Tentang sengketa atas Terusan Suez yang mengakibatkan pecahnya perang Suez tahun 1956 dan penutupannya lihat G. Lenczowski, op. cit. hal. 622-626.

serta keamanan lalu-lintas pelayaran di terusan tersebut dengan baik. Usaha Perusahaan Terusan Suez untuk mengacaukan pengelolaan oleh Mesir dengan menarik pemandu-pemandunya mengalami kegagalan. Perawatan dan pengembangan terusan berjalan dengan baik sebagaimana dapat dilihat dari kenyataan bahwa sesudah nasionalisasi terusan telah diperlebar sehingga dapat dilalui kapal dengan sarat muatan sampai 60.000 ton dan kapal-kapal dengan balas bahkan sampai 150.000 ton.

IV. Arti Terusan Suez

Penggalian Terusan Suez mempunyai arti besar bagi perekonomian dan perdagangan dunia. Jarak pelayaran antara Eropa dan Asia; menjadi diperpendek 6.400 km, Eropa - Afrika Timur dengan 4.800 km dan jarak antara Laut Hitam dengan Samudera Hindia bagian utara bahkan dengan 16.000 km¹. Dengan demikian maka frekwensi pelayaran dapat lebih ditingkatkan sehingga biaya pengangkutan dapat dikurangi dan harga barang-barang diturunkan.

Kapal-kapal yang sebelumnya melewati Tanjung Harapan berpindah melewati Terusan Suez sehingga lalu-lintas menjadi ramai dan perdagangan internasional meningkat, lebih-lebih lagi setelah minyak bumi menjadi salah satu bahan ekspor terpenting. Sekitar 70% muatan berupa minyak bumi, bahan bakar utama dan bahan mentah yang paling diperlukan bagi peradaban industri kontemporer². Jumlah kapal yang menggunakan Terusan meningkat terus dari 486 buah kapal pada tahun 1870 menjadi 17.500 buah pada tahun 1958 dan 21.250 buah pada tahun 1966. Hampir separuh dari jumlah yang terakhir ini terdiri dari kapal-kapal tanki. Volume pengangkutan penumpang berjumlah 299.557 orang penumpang sedangkan jumlah muatan barang mencapai 47.725.000 ton muatan ke jurusan selatan sedangkan ke jurusan utara sekitar 194.163.000 ton.

Arti Terusan Suez bagi perdagangan internasional terlihat lebih jelas setelah Terusan Suez ditutup bagi pelayaran internasional pada tahun 1967 sebagai akibat perang Arab-Israel.

¹ Lihat "Suez Canal", dalam Encyclopaedia Americana, XXV (New York, 1971), hal. 800; The New Standard, 31 Mei 1975.

² Lihat "The Suez Canal", dalam The Middle East and North Africa 1974-1975 (London, 1975), hal. 101.

Selain memerlukan waktu pelayaran yang lebih banyak, diperlukan pula biaya yang lebih besar. Diperkirakan biaya tambahan akibat penutupan Terusan adalah sebesar US\$ 1.700 juta setahun dan bahkan dengan meningkatnya harga minyak mencapai US\$ 10.000 juta, yaitu separuh untuk Amerika Serikat dan Eropa Barat dan separuh lainnya lagi untuk Jepang¹. Ekspor dari negeri-negeri di Afrika Timur ke Eropa mengalami penurunan sebesar 13%.

Pembukaan Terusan Suez juga menciptakan banyak kesempatan kerja bagi orang-orang Mesir dan meningkatkan perdagangan mereka. Port Said telah berkembang menjadi salah satu pelabuhan paling besar di dunia dengan perlengkapan dan fasilitas servis, reparasi, perbekalan, dinas-dinas penambatan, penyelamatan dan lain sebagainya. Menurut perkiraan sementara orang, perdagangan Mesir dalam waktu dekat ini akan dapat mencapai volume US\$ 2.000 juta lebih².

Perkembangan Terusan Suez tersebut memungkinkan dilaksanakannya pembangunan daerah industri. Pemerintah Mesir sudah mulai melaksanakan suatu rencana pembangunan secara besar-besaran. Mungkin Presiden Sadat tidak akan berhasil menjadikan daerah Suez menjadi "daerah Ruhr" Timur Tengah, tapi paling tidak daerah tersebut akan menjadi daerah industri yang penting, karena letaknya yang strategis di urat nadi perhubungan dan perdagangan dunia dan juga kesempatan yang ada untuk menggunakan tenaga listrik bendungan Aswan yang sejauh ini belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Di samping artinya bagi perekonomian internasional maupun Mesir sendiri, Terusan Suez juga merupakan sumber keuntungan bagi Perusahaan yang memiliki dan mengkaryakannya, yaitu Perusahaan Terusan Suez hingga tahun 1956 dan Otoritas Terusan Suez setelahnya. Bea-transit bagi setiap kapal yang melewatinya cukup tinggi, pada tahun 1957 kapal dengan sarat muatan diharuskan membayar US\$ 1,006 per ton sedangkan kapal dengan balas sebesar US\$ 0,458 per ton. Bea transit tersebut kini telah dinaikkan menjadi \$ 2,-- per ton bagi kapal tanki; \$ 2,197 per ton bagi kapal sarat muatan dan \$ 1,598 per ton bagi kapal dengan balas³. Dengan demikian terdapat kenaikan bea transit sekitar 100% dari keadaan tahun 1967. Sebelum

¹ Lihat Antara, 19 Mei 1975.

² Lihat Antara, 1 April 1975, yang mengutip Reuter.

³ Lihat Antara, 25 Mei 1975, yang mengutip UPI.

penutupan Terusan Suez tahun 1967, pemerintah Mesir dari bea transit menerima sekitar \$ 250 juta, sekarang diperkirakan akan menerima sebesar \$ 450 juta per tahun. Terusan Suez diperkirakan akan ramai dengan kapal-kapal barang dan penumpang sekalipun kapal-kapal tanki raksasa akan meneruskan pelayaran-nya melalui Tanjung Harapan sampai rencana pelebaran, pengerukan, peningkatan Terusan selesai dikerjakan sekitar tahun 1981.

Di samping arti ekonomi, Terusan Suez juga mempunyai arti strategi, khususnya bagi negara-negara maritim yang memiliki strategi global¹. Pada masa lampau, Inggris sebagai negara maritim utama melihat Terusan Suez sebagai salah satu mata rantai kehidupan imperiumnya, terutama karena menghubungkan-nya secara langsung dengan negara-negara jajahannya di Afrika Timur dan Asia, khususnya koloninya yang paling kaya India. Terbukanya Terusan tersebut mempermudah usahanya untuk memper-tahankan supremasi dan dominasinya di kawasan Asia dan Afrika dan oleh karena itu Inggris berambisi sekali untuk menenangkan pengaruhnya atas Terusan Suez dengan membeli 40% saham Perusa-haan Terusan Suez yang ditawarkan raja muda Mesir, dan juga usahanya menempatkan dirinya dalam konvensi Istanbul sebagai negara yang berhak dan berkuasa untuk menutup Terusan pada waktu perang.

Peranan strategis Terusan tersebut terlihat lebih jelas lagi dengan intensifnya usaha Italia dan Jerman dalam perang dunia ke-II untuk merobut daerah tersebut guna memotong hubung-an langsung antara Inggris dengan daerah-daerah koloninya. Dan sebaliknya Inggris untuk mempertahankan kedudukannya di daerah tersebut merelakan untuk mengurangi kekuatannya di teater-teater perang lainnya dan mengerahkannya untuk memper-tahankan daerah Suez tersebut.

Setelah imperium Inggris runtuh dan negara-negara jajahan-nya satu persatu mendapatkan kemerdekaannya, Terusan Suez men-jadi berkurang arti strateginya bagi Inggris. Namun tidak demikian halnya bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mun-cul sebagai pemenang perang dunia ke-II, dua negara super yang berhadapan dalam persaingan memperluas daerah pengaruh. Bagi strategi global yang diminatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka kecepatan bergerak angkatan perangnya dari satu daerah

¹ Tentang arti strategi Terusan Suez lihat G. Lenczowski, *op. cit.* hal. 597-598; Richard Bart, "Verbal gunfire over United states and Soviet roles in Indian Ocean. Suez Canal opening could give Soviets an edge", dalam *Indonesian Observer*, 13 Juni 1974.

ke daerah lain merupakan hal yang menentukan, dan oleh karena itu Terusan Suez yang terletak pada titik silang Samudera Atlantik dan Samudera Hindia maupun Pasifik mempunyai peranan yang sangat penting.

Bagi Uni Soviet, dengan dibukanya Terusan Suez, tidak hanya berarti mempercepat dan mempermudah angkutan barang-barang dari negaranya di bagian barat Asia dengan di bagian timur Asia, akan tetapi juga mempermudah usaha peningkatan dan pembangunan kekuatan militernya di Samudera Hindia. Satuan-satuan angkatan lautnya mulai memasuki Samudera Hindia sekitar tahun 1968 ketika Inggris mengumumkan niatnya untuk menarik pasukannya dari sebelah timur Suez. Kini jumlah kapal Uni Soviet telah mencapai sekitar 30 kapal termasuk kapal-kapal pembantu. Sebelum Terusan dibuka untuk mencapai bagian timur Afrika di Samudera Hindia, kapal-kapal perang Uni Soviet dari pelabuhannya di Wladiwostok harus melayari jarak sekitar 14.000 km sedangkan dari Laut Hitam dengan melewati Tanjung Harapan perlu menempuh jarak 19.500 km. Dengan dibukanya Terusan Suez maka kapal-kapal perangnya dari pelabuhannya di Laut Tengah cukup menempuh jarak 3.500 km untuk memasuki kawasan Samudera Hindia, dengan demikian mempercepat, dan meningkatkan kemampuan operasi armada Uni Soviet di Samudera Hindia dan menguntungkan kedudukannya¹. Dengan dibukanya Terusan tersebut, maka Uni Soviet akan dapat mengawasi gerak-gerik kapal-kapal selam nuklir Poseidon dan Polaris Amerika Serikat yang diduga berpatroli di perairan itu, dan juga Uni Soviet mempunyai kemungkinan untuk mengepung negara-negara penghasil minyak di Teluk Parsi dan mengancam rute suplai minyak negara-negara barat dan Jepang apabila dianggap perlu. Kehadiran armada Uni Soviet di Samudera Hindia merupakan alat pendukung sasaran politik maupun ekonominya tanpa perlu terjadi adanya tembak menembak. Untuk mempertahankan usahanya ini maka Uni Soviet menjalin hubungan baik dengan negara-negara di sepanjang kawasan tersebut dan berusaha mendapatkan fasilitas penggunaan pangkalan militer antara lain di Berbera Somalia.

Untuk mengimbangi kedudukan Uni Soviet tersebut maka Amerika Serikat sejak 1 Januari 1972 telah memperluas daerah operasi armada ke-VII nya di Samudera Pasifik hingga meliputi Samudera Hindia. Dan dengan dibukanya Terusan Suez, maka dimungkinkan hubungan langsung antara armada ke-VI Amerika Serikat di Laut Tengah dengan armada ke-VII nya di Samudera

¹ Lihat "West Europe too worries about the Indian Ocean", dalam The New Standard, 25 April 1974.

Hindia, namun secara keseluruhan pembukaan Terusan Suez lebih menguntungkan pihak Uni Soviet dalam perlombaan pembangunan kekuatan militer di kawasan itu. Melihat perkembangan tersebut maka negara-negara barat lainnya berusaha pula mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Perancis meningkatkan kekuatan militernya di Samudera Hindia dan Jibouti di teluk Aden; Inggris menambah kapal perangnya yang berpatroli di perairan dan ditunjang pula oleh pesawat-pesawat RAF yang berpangkalan di Gan, Republik Maladewa dan di pulau Masirah di lepas pantai Oman.

Dengan persetujuan Inggris, Amerika Serikat membangun suatu pusat komunikasi militer, suatu stasiun untuk memonitori komunikasi militer Uni Soviet, dan fasilitas-fasilitas pertahanan di pulau Diego Garcia, dan bahkan bermaksud meningkatkannya menjadi pangkalan militer yang dapat menampung segala jenis kapal perang dan pesawat terbang. Akhir-akhir ini Amerika Serikat juga berhasil mendapatkan fasilitas untuk mempergunakan lapangan udara di pulau Masirah dengan persetujuan Oman dan Inggris. Sejauh ini negara-negara barat masih berhasil mempertahankan supremasi mereka di kawasan Samudera Hindia, namun perlombaan masih tetap berjalan¹.

Pembukaan Terusan Suez juga merupakan penunjang bagi usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel secara damai, terutama karena dengan tindakan tersebut mengurangi kecurigaan Israel terhadap kemauan baik Mesir dan negara-negara Arab lainnya, yang selama ini merupakan salah satu hambatan utama perdamaian. Tindakan Mesir membuka Terusan Suez dan membangun daerah tersebut mengungkapkan keinginan Mesir untuk terbentuknya perdamaian dan ditanggapi dengan positif oleh hampir semua pemimpin Israel, dan dinilai sebagai unsur "non belligerency" pihak Mesir. Surat kabar independen Haaretz menilai pembukaan kembali Terusan tersebut sebagai mengurangi kesempatan terjadinya perang. Sebagai tanggapan, Israel menyediakan diri untuk memberikan konsesi-konsesi demi tercapainya perdamaian, karena keadaan perang yang berlarut-larut tersebut juga merupakan beban yang sangat berat bagi rakyat Israel sendiri. Prosentase anggaran pertahanannya termasuk yang tertinggi di dunia, pada

¹ Tentang perlombaan persenjataan di Samudera Hindia lihat Oskar Weggel, "Zur Lage im Indischen Ozean", dalam CHINA aktuell, Mei 1974, hal. 240-248; "Power East of Suez", dalam Newsweek, 12 Nopember 1973, hal. 15.

tahun 1974 mencapai sekitar \$ 3.638 juta atau lebih dari 40% GNP-nya¹. Israel-pun mengharapkan perdamaian tersebut dan bersedia memenuhi syarat-syarat pihak Arab asal mendapatkan keyakinan dan jaminan bahwa negara-negara Arab benar-benar melepaskan tekad mereka untuk menghilangkan eksistensi Israel dan bersedia mengakui hak hidup Israel serta hidup dengan aman.

V. Penutup

Dengan Dekrit Nasionalisasi yang diumumkan pada tanggal 16 Juli 1956 Pemerintah Mesir merupakan pemilik dan pengatur tunggal Terusan Suez, namun dalam kaitannya dengan Konvensi Istanbul 1888 yang diakui Mesir, juga sesudah nasionalisasi, maka Terusan Suez tetap terbuka bagi semua kapal-kapal dagang maupun perang bagi semua negara, baik pada waktu damai maupun perang. Segala macam bentuk pertempuran di atas perairan Terusan Suez dilarang, dan Mesir sebagai negara yang berdaulat atas Terusan tersebut berhak mengambil, tindakan-tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak melanggar kebebasan lalu-lintas pelayaran.

Semula Perusahaan Terusan Suez tidak mengakui nasionalisasi, namun setelah pada tanggal 13 Juli 1958 ditanda-tangani persetujuan ganti rugi antara pemerintah Mesir dengan pihak Perusahaan Terusan Suez dengan pengawasan Bank Dunia, maka persoalannya menjadi selesai. Untuk itu Pemerintah Mesir memberikan ganti rugi sebesar 28,3 juta pond Mesir (= \$ 81.221.000) dan Perusahaan Terusan Suez tetap mempunyai hak atas kehayaannya yang berada di luar Mesir. Untuk operasi Terusan pemerintah Mesir menyerahkannya kepada Otoritas Terusan Suez yang sejak semula dipimpin oleh Mashour Ahmed Mashour.

Pembukaan Terusan Suez mempunyai arti ekonomi yang sangat besar baik bagi perekonomian nasional Mesir sendiri maupun bagi perdagangan internasional, mempunyai arti strategi yang sangat besar terutama bagi negara-negara super yang menjalankan strategi global khususnya bagi kekuatan armada lautnya, dan di samping itu juga mempunyai arti politik yang cukup besar di dalam penyelesaian sengketa Arab-Israel.

¹ Lihat Military Balance 1974-1975 (London 1975).

DERAP JUANG BANGSA PALESTINA

O. Abdul RACHMAN

I. Pendahuluan

Dalam Konperensi Menteri-Menteri Luar Negeri negara-negara Islam pertengahan bulan Juli 1975 di Jeddah telah diambil beberapa resolusi mengenai masalah Palestina dan Jerusalem. Indonesia diangkat menjadi anggota dalam Komisi Tetap mengenai Jerusalem yang ditugaskan untuk melaksanakan resolusi-resolusi yang pernah diambil oleh Konperensi-Konperensi Islam mengenai kota tersebut. Dibetaskan pula sebuah resolusi untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaannya di PBB.

Dengan diluktsertakannya Indonesia dalam Komisi Tetap tersebut, walaupun Indonesia dalam Konperensi Islam hanya sebagai peninjau, dapat diartikan bahwa Indonesia diharapkan memainkan peranan yang lebih aktif dalam menyelesaikan sengketa Arab-Israel.

Ulasan strategis berikut bertujuan untuk menonjolkan perjuangan bangsa Palestina dalam rangka pertikaian di Timur Tengah. Bangsa Palestina telah berkembang dari status sebagai obyek menjadi subyek yang harus ikut diperhitungkan dalam perkembangan selanjutnya.

II. Sejarah perkembangan

Sebelum perang dunia I wilayah Timur Dekat dan Timur Tengah merupakan bagian dari kerajaan Turki. Karena Turki pada waktu itu bersekutu dengan Jerman, maka bangsa-bangsa Arab di wilayah tersebut dengan dukungan Inggris dan Perancis, yang waktu itu merupakan super-powers, memisahkan diri dari Turki,

Pada tahun 1915 antara Rusia-Czar, Inggris dan Perancis ditanda-tangani perjanjian yang dikenal dengan sebutan perjanjian Sykes Picot, yang membagi daerah kerajaan Turki sebagai berikut: Daerah Istanbul dan sekitarnya dikuasai oleh Rusia-Czar; daerah Syria dan Lebanon di bawah Perancis sedangkan daerah Irak, Arab, dan Yordania di bawah kekuasaan Inggris.

Sudah banyak diketahui umum bahwa seorang agen Inggris bernama Lawrence yang beroperasi di daerah Hejaz telah menggerakkan Raja Husein dalam operasi anti Turki, namun kurang diketahui bahwa Lawrence bekerja di bawah komando Markas Besar Inggris yang berkedudukan di Kairo pada waktu itu. Sedangkan di samping itu Markas Besar Inggris yang berkedudukan di New Delhi juga mengadakan operasi di Semenanjung Arab dengan mempergunakan Saud dari daerah Mejd.

Raja Husein dengan bantuan Lawrence dan beberapa perwira Inggris lainnya berhasil menduduki kota-kota Mekkah, Medina dan Jeddah. Akan tetapi pada waktu perang berakhir Raja Husein beserta anak-anaknya Abdallah dan Feisal oleh Inggris diserahkan daerah Irak dan Lembah Yordan, sedangkan daerah Hejaz diserahkan kepada dinasti Saud. Sementara wilayah Palestina direncanakan akan tetap berada di bawah mandat Inggris.

Sementara itu pada tahun 1917, seorang Menteri Inggris bernama Balfour menyatakan dalam surat menyuratnya dengan Lord Rotschild, bahwa Inggris menyetujui usaha untuk mengadakan "a national home for the Jewish people", akan tetapi dengan persyaratan bahwa "nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine". Untuk mencegah kemungkinan timbulnya reaksi-reaksi negatif dari dunia Arab, maka pemerintah Inggris menegaskan kepada Raja Husein, bahwa tempat-tempat suci di Jerusalem akan ditempatkan di bawah pemerintah khusus sedangkan Mesjid Omar-Mesjid Al Aqsa dijamin tidak akan ditempatkan di bawah kekuasaan non-Moslem.

Keputusan Inggris untuk tetap menguasai daerah Palestina dengan mengadakan "a national home for the Jewish" terdorong oleh pertimbangan strategis bahwa orang-orang Yahudi di Eropa Timur memerlukan tempat aman untuk hidup, kedua agar Inggris dapat tetap menguasai Terusan Suez sedangkan ketiga agar mendapatkan bantuan dari kelompok masyarakat Yahudi di Amerika Serikat untuk kelanjutan peperangan.

Pada waktu daerah Palestina masih dikuasai oleh Turki, penduduk-penduduk Palestina hidup dengan rukun. Berbeda dengan keadaan bangsa-bangsa Arab yang tinggal di daerah padang pasir seperti di Semenanjung Arab maka daerah Palestina merupakan daerah yang subur. Penduduk mengusahakan perkebunan, buah-buahan, pertanian dan perdagangan dengan baik. Bahkan penduduk Islam, Kristen dan Yahudi sering menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan di wilayah tersebut. Kerukunan tersebut menjadi kabur dengan datangnya orang-orang Yahudi berdasarkan Deklarasi Balfour.

Pernyataan Balfour tadi disambut oleh masyarakat Yahudi di seluruh dunia dalam usahanya untuk mendirikan sebuah negara Yahudi -Israel- di wilayah Palestina. Usaha mendirikan "a national home for the Jewish" timbul karena orang-orang Yahudi di Rusia dan Eropa Timur lainnya sering menderita geno-cide dari penduduk setempat. Menurut angka-angka statistik, jumlah penduduk Yahudi di Palestina antara tahun 1918-1946 menunjukkan pertambahan dari 56.000 jiwa menjadi 608.230 jiwa atau dari 3% menjadi 52% jumlah seluruh penduduk di wilayah tersebut. Pesatnya pertambahan orang Yahudi sejak 1931 terutama disebabkan oleh politik Anti-Semitisme yang dijalankan Hitler.

Tahun	Muslim	Kristen	Yahudi	Jumlah
1918	574.000	70.000	56.000	700.000
1922	590.900	73.014	83.794	757.182
1931	759.712	91.398	174.610	1.035.000
1946	1.203.780	145.060	608.230	1.972.560

Walaupun dalam pernyataan Balfour dicantumkan kalimat bahwa imigrasi Yahudi ke Palestina tidak akan mengurangi atau merugikan hak dan kedudukan dari penduduk Non-Yahudi di Palestina; namun sejak didirikannya perkampungan Yahudi telah menimbulkan persengketaan-persengketaan karena pengusiran orang-orang Arab. Secara resmi Inggris sebagai mandataris wajib melindungi pelaksanaan Deklarasi Balfour, terutama dalam rangka melindungi hak penghuni asli, namun kenyataan menunjukkan bahwa perkampungan Yahudi makin lama makin banyak. Pada tahun 1921, 1929 dan 1936 meletus reaksi dari penduduk Arab terhadap ekspansi Yahudi tersebut yang hanya berhasil diatasi melalui tindakan-tindakan tentara Inggris dan aksi-aksi teror kesatuan-kesatuan Yahudi.

Pada tahun 1939 pemerintah Inggris membatasi imigrasi Yahudi dengan jumlah maksimum 75.000 orang untuk masa 5 tahun. Akibatnya timbul protes keras orang-orang Yahudi dalam bentuk operasi teror yang dijalankan oleh tiga organisasi Yahudi yaitu Haganah, Irgun Zvai Leumi dan Pasukan Stern untuk memaksa pemerintah Inggris dan pemerintah di Palestina meninjau kembali pembatasan imigrasi Yahudi tersebut.

Organisasi Haganah tersebut kemudian berkembang menjadi Angkatan Perang Israel yang membawakan motivasi Yahudi-Israel untuk selalu memelihara keunggulan persenjataan dalam mempertahankan hidupnya, baik sebagai individu maupun negara. Dalam rangka inilah setiap orang Yahudi yang telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan latihan kemiliteran. Sebaliknya penduduk Arab kurang memperlihatkan kesatuan tekad dan kemampuan seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Percekcokan di antara golongan Arab satu dengan yang lain bahkan makin melemahkan kedudukan Arab sendiri di Palestina.

Bertambahnya orang-orang Yahudi yang melakukan exodus secara besar-besaran dan mendesak penghuni-penghuni asli, yaitu orang-orang Palestina, menimbulkan persengketaan yang makin menjadi-jadi, sehingga Inggris sebagai mandataris pada tahun 1947 terpaksa mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menarik mandat yang diberikan kepadanya karena tidak sanggup lagi mengatasinya. Pada tanggal 15 Mei 1947 PBB membentuk sebuah komisi -United Nations Special Commission on Palestine- untuk mempelajari persoalan Palestina. Tanggal 29 Nopember 1947 Sidang Umum PBB menyetujui saran komisi untuk membagi Palestina menjadi dua, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab-Palestina, dan kedua negara tersebut diatur dalam satu Uni Ekonomi, sedangkan kota Jerusalem ditempatkan di bawah pengawasan internasional. Resolusi PBB tersebut sangat ditentang oleh pihak Arab, baik yang tinggal di daerah Palestina maupun sekitarnya.

Antara Desember 1947 dan 15 Mei 1948 -Hari Proklamasi Negara Israel- pihak Yahudi melalui ketiga organisasi bersenjataanya mengadakan aksi-aksi teror untuk meluaskan daerah penguasaannya menjelang proklamasi guna mendapatkan dasar realitas bagi batas-batas negaranya. Sebagai akibat operasi tersebut timbullah masalah pengungsi Arab-Palestina yang makin lama makin besar jumlahnya, sehingga pada tahun 1974 telah tercatat sejumlah lebih dari satu setengah juta

pengungsi Arab-Palestina pada badan-badan pengungsi PBB, sedangkan setengah juta lainnya hidup di kamp-kamp pengungsian dalam keadaan melarat di Yordania, Syria dan Lebanon di samping 200.000 orang yang tinggal di Kuwait. Dipandang dari sudut kependudukan pada tahun 1947 penduduk bangsa Yahudi hanya merupakan sepertiga dari jumlah seluruh penduduk Palestina, dan hanya sepersepuluh dari penduduk bangsa Yahudi pada waktu itu merupakan penduduk Palestina asli sedangkan yang lain adalah pendatang-pendatang baru.

Resolusi PBB 1947 untuk membagi daerah Palestina menjadi dua negara dan menjadikan Jerusalem sebagai daerah internasional tidak pernah terlaksana. Dengan diproklamasikannya Israel maka Mesir, Syria dan Yordania melakukan serangan terhadapnya. Yordania di bawah Raja Abdallah berhasil menduduki Kota Jerusalem kuno dan daerah yang direncanakan akan menjadi Arab-Palestina, sedangkan Israel berhasil tetap mempertahankan Jerusalem baru. Keadaan itu berlangsung hingga tahun 1967 yaitu ketika Israel dalam perang Arab-Israel ke-III berhasil menduduki seluruh kota Jerusalem, termasuk Mesjid Al Aqsa, sebuah mesjid keramat bagi umat Islam, bagian Barat sungai Yordan dan sebagian Ketinggian Golan.

III. Pengorganisasian perjuangan

Semangat juang pembebasan bangsa Palestina mula-mula tidak tertuang dalam organisasi-organisasi perjuangan. Pengorganisasian perjuangan baru terjadi sekitar tahun 1965 dengan terbentuknya Palestine Liberation Organization (PLO) di bawah pimpinan Ahmed Shukairy, yang merupakan hasil sidang Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council) di Jerusalem. Organisasi yang terkuat bergabung dalam PLO adalah organisasi Al Fatah di bawah pimpinan Yassir Arafat. Di samping sebagai pimpinan organisasi Al Fatah, Yassir Arafat juga memimpin langsung Al Assifa yaitu pasukan bersenjata Al Fatah. Sejak tahun 1968, Yassir Arafat berusaha mempererat hubungannya dengan Aljazair dan meyakinkan Ghadaffi dari Libya mengenai perjuangan Al Fatah. Di samping itu Yassir Arafat juga mengusahakan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Kuwait; persenjataan dari Uni Soviet serta bantuan-bantuan lain dari Syria. Usaha-usaha Yassir Arafat dapat dikatakan berhasil,

sehingga pada tahun 1968 dengan kekalahan Arab dalam perang enam hari tahun 1967 Yassir Arafat dapat merebut pimpinan PLO dari tangan Ahmed Shukairy.

Bulan Maret 1968 sebagai pembalasan atas serbuan teroris Arab terhadap sebuah bus yang memuat anak-anak Yahudi maka Israel melakukan serangan terhadap kota Karamleh, sebuah kota kecil di wilayah Timur sungai Yordan berpenduduk hanya 20.000 jiwa. Israel memperkirakan bahwa kelompok teroris tersebut mengadakan serbuannya dari kota tersebut.

Gerakan pasukan Israel ke arah Karamleh tersebut mendapatkan perlawanan dari satuan-satuan Legiun Arab Yordania dan satuan-satuan Komando Palestina. Pertempuran berlangsung selama 15 jam dan berakhir dengan mundurnya pasukan Israel. Peristiwa Karamleh ini merupakan salah satu titik permulaan perkembangan kegiatan Komando-komando Palestina, karena dalam pandangan umum Arab, baik di Palestina maupun masyarakat Arab di sekitarnya, peristiwa Karamleh digambarkan sebagai kemenangan komando. Ribuan pengungsi-pengungsi Palestina, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi-organisasi perjuangan Palestina, terutama di wilayah Yordania.

Setelah kekalahan perang pada bulan Juni 1967, maka kemenangan di Karamleh dan juga aksi-aksi pembajakan-pembajakan pesawat-pesawat terbang sekitar tahun 1970 telah mempertinggi kembali semangat juang pengungsi-pengungsi Palestina. Namun, sayang, bahwa organisasi-organisasi Komando tersebut tidak dapat bersatu di dalam menghadapi Israel, bahkan mereka terjerumus dalam percekcoakan di antara mereka sendiri termasuk pula permusuhan dengan Raja Husein dari Yordania. Lebih banyak pejuang Palestina yang mati dalam pertentangannya dengan Raja Husein dibandingkan dengan yang mati dalam perlawanannya menghadapi Israel.

Antara tahun 1968 dan 1971 aktivitas Komando Palestina terlihat menonjol di daerah Yordania dengan puncak kegiatannya pertempuran di Karamleh dan pembajakan empat pesawat terbang di Dawson Field, yang berkelanjutan kemudian dengan dihancurkannya sendiri pasukan-pasukan Komando Palestina oleh satuan Legiun Arab Yordania pada tahun 1971. Setelah tahun 1971 pangkalan kesatuan Komando Palestina dipindahkan ke Lebanon, di mana Beirut menjadi Markas Besar PLO dan juga organisasi-organisasi komando lainnya seperti People's Front for Liberation of Palestine (PFLP) di bawah George Habash.

Tahun 1971 tersebut merupakan permulaan gerakan teror yang dilakukan oleh Gerakan Black September dan PFLP di bawah George Habash. Walaupun kebanyakan pemimpin-pemimpin Palestina tidak menyetujui tindakan-tindakan teror kedua organisasi tersebut, namun setiap operasi teror disambut dengan gembira terutama oleh kelompok pemuda Palestina yang kurang mempercayai lagi cara-cara politik moderat pimpinannya. Bahkan badan Intel dari Al Fatah -Jihaz Al Rasid- di bawah pimpinan Abou Yussuf dan wakilnya Hasan Salameh, sekalipun tanpa persetujuan Yassir Arafat pimpinan PLC, memberikan bantuannya secara aktif dalam operasi teror Black September dan PFLP.

Pembunuhan Perdana Menteri Yordania Wasfi Tal pada tanggal 23 Nopember 1971 di Kaifo merupakan operasi teror besar yang berhasil, yang diikuti oleh serentetan aksi teror lainnya seperti penyerbuan terhadap Kedutaan Besar Saudi Arabia di Khartoum di mana dua diplomat Amerika dan satu diplomat Belgia mati terbunuh, demikian pula operasi yang terjadi di Bangkok serta pembajakan pesawat terbang Jumbo Jet Jepang dan peristiwa pembunuhan massal di pelabuhan udara Roma. Peristiwa Lod -pembunuhan massal di lapangan terbang internasional Israel- yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Jepang anggota Japanese Red Army yang bertindak selaku sekutu PFLP. Dan bahkan hingga tahun 1974-pun operasi-operasi teror masih tetap dilanjutkan antara lain peristiwa pembunuhan massal terhadap anak-anak sekolah di Maalot bulan Mei 1974, pembajakan pesawat VC-10 Inggris ke Tunisia oleh empat teroris bulan Nopember serta aksi 'bunuh diri' kelompok Ahmed Jibril dari PFLP-General Command- ke wilayah Israel dari pangkalannya di Lebanon.

Baik operasi-operasi teror maupun infiltrasi yang dilakukan dari daerah Yordania maupun Lebanon ternyata tidak menggoyahkan semangat Israel, dan bahkan dengan keunggulan senjatanya Israel telah mengadakan pemboman-pemboman dan serangan-serangan balasan ke dalam wilayah Lebanon sebagai jawaban atas aksi teror organisasi-organisasi pembebasan tersebut.

IV. Teror dan diplomasi politik

Sejak 1963 Palestine Liberation Organization (PLO), di bawah Yassir Arafat, berkembang dengan sangat cepat dan diakui oleh pemimpin-pemimpin Arab sebagai organisasi yang cukup dapat

diandalkan dan dipertanggung-jawabkan. Termasuk di dalam organisasi itu adalah organisasi Al Fatah yang merupakan organisasi induk Yassir Arafat, dan sepenuhnya menguasai Al Assifa yaitu angkatan bersenjata Al Fatah, yang langsung berada di bawah komando Yassir Arafat. Di samping itu Yassir Arafat juga menguasai peralatan sipil dan praktis bertindak sebagai pemerintahan Palestina dalam pengasingan. Selanjutnya didirikan pula semacam kesatuan Polisi Militer yang disebut sebagai Palestina Armed Struggle Command yang juga langsung bertanggung jawab kepada Arafat pribadi. Terdapat pula organisasi pejuang yang besar, Al Saiqa, yang sepenuhnya dikuasai oleh Intel Militer Syria yang merupakan pelaksana strategi Syria untuk memperjuangkan sebuah Syria Raya, yang akan mencakup Lebanon, Palestina dan Syria. Di samping itu terdapat pula organisasi lain yang terkenal radikal di bawah George Habash bernama People's Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Sekelompok anggota PFLP di bawah Nayef Hawatmeh memisahkan diri dari PFLP dan mendirikan People's Democratic Front for the Liberation of Palestine (PDFLP), dan sebagian lagi di bawah Ahmed Jibril, seorang bekas perwira Syria mendirikan PFLP-General Command.

Walaupun semua organisasi pejuang Palestina tersebut menurut ketentuan sidang Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council), semacam parlemen Palestina, seharusnya bernaung di bawah PLO, namun dalam perkembangannya ternyata bahwa George Habash dan Ahmed Jibril tidak bersedia mengikuti ketentuan yang ada dan mereka lebih mementingkan aksi langsung, teror langsung, bukan saja terhadap Israel akan tetapi juga terhadap pemimpin-pemimpin Arab yang menentang atau dinilai merugikan perjuangan bangsa Palestina.

Yassir Arafat sebagai pemimpin PLO, yang memiliki kekuatan nyata, baik pasukan bersenjata Al Assifa, Palestina Armed Struggle Command, maupun infra-struktur pemerintahan sipil yang diatur melalui organisasi Al Fatah-nya, serta bantuan keuangan yang cukup besar terutama dari Kuwait dan pemimpin-pemimpin Arab lainnya, memiliki kemahiran dan kebijaksanaan sebagai pemimpin dalam usahanya mengatasi pertentangan-pertentangan yang terdapat di antara fraksi-fraksi di dalam PLO. Arafat melakukan perjalanan dari ibukota Arab yang satu ke yang lainnya dan berhasil mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya pemimpin Palestina yang bertanggung jawab.

Walaupun adanya tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh PFLP, namun Arafat tidak pernah dikenal sebagai seorang teroris. Aksi teror PFLP untuk sebagian merupakan faktor yang menguntungkan perjuangan bangsa Palestina di samping politik diplomasi Arafat. Kedua cara tersebut saling melengkapi dan bertujuan untuk memelihara perhatian dunia di dalam menyelesaikan perjuangan bangsa Palestina.

Memang benar, bahwa perjuangan bangsa Palestina, baik dalam rangka PLO melalui Al Fatah, Al Saiqa dan People's Democratic Front, maupun aksi teror dalam rangka perjuangan PFLP yang semuanya bergerak dari luar daerah Palestina selalu menjadi berita-berita besar dalam persurat-kabaran dunia, namun tidak kurang pentingnya perjuangan sengit yang dilakukan oleh bangsa Palestina di daerah pendudukan Israel walaupun dengan cara-cara lain.

Pada bulan Agustus 1973 didirikan National Palestine Front (NPF) yang bersifat organisasi rakyat dan mendapatkan dukungan semua lapisan masyarakat Palestina. Komite Sentral organisasi tersebut terdiri dari wakil-wakil semua organisasi politik dan Fedayeen, baik yang bersifat organisasi keagamaan, profesi, tuan-tuan tanah dan orang-orang Palestina terkemuka. Menurut Eric Rouleau bahkan dikatakan bahwa organisasi ini diperkuat pula oleh kader-kader Partai Komunis Yordania; yang dengan pengalaman dan efisiensinya dalam beroperasi di bawah tanah telah mempertinggi kemahiran NPF dalam menghadapi pendudukan Israel.

NPF telah memimpin pemboikotan oleh Maryawan-karyawan Palestina yang bekerja di perusahaan-perusahaan Israel pada waktu meletusnya perang Oktober 1973; mengorganisir pemboikotan pemilihan Kotapraja Jerusalem oleh mayoritas penduduk-penduduk Arab pada tahun 1973; menggerakkan 160 penduduk Palestina menanda-tangani suatu pernyataan untuk menunjuk PLO sebagai satu-satunya perwakilan bangsa Palestina yang diadakan pada tahun 1974 sebelum KTT-Arab di Maroko (Rabat). Juga menjelang munculnya Yassir Arafat di depan Sidang Umum PBB antara tanggal 13-23 Nopember 1974 NPF mengadakan "aksi pembangkitan rakyat" dalam bentuk-bentuk perogokan-perogokan, pawai-pawai, demonstrasi-demonstrasi dan bahkan juga serbuan-serbuan terhadap pos-pos polisi Israel di daerah pendudukan. Walaupun NPF tidak membenarkan adanya teror atau pemboman, namun hampir setiap harinya hingga dewasa ini masih terjadi tindakan teror baik berupa pelemparan granat, penakikan benda-benda Palestina di daerah Israel dan lain sebagainya.

Reaksi Israel dalam menghadapi aksi teror tersebut baik terhadap organisasi-organisasi yang melakukan teror ataupun negara-negara Arab di sekitarnya adalah melalui tindakan-tindakan kekerasan yang didasarkan atas kekuatan senjata. Terutama di dalam negeri dan daerah-daerah pendudukan kekuatan bersenjata Israel melakukan penahanan, penangkapan, pencabutan paspor, deportasi dan lain-lain tindakan untuk mengatasi gerakan pembebasan Palestina. Namun demikian perjuangan bangsa Palestina masih terus menggalak dalam rangka menciptakan sebuah negara Palestina Merdeka.

V. Menuju Palestina Merdeka ?

Antara tahun 1948-1967 empatkali perang Arab-Israel meletus, dan di dalam motivasi peperangan tersebut di pihak Arab senantiasa tercantum usaha membebaskan Palestina sebagai unsur utama. Empat kali berturut-turut Israel membuktikan keunggulannya di bidang persenjataan dan ketrampilannya berperang di dalam menghadapi kelompok Arab yang saling bertengkar dan tidak bersatu. Resolusi PBB tahun 1947 yang bermaksud untuk membagi Palestina menjadi dua negara, negara Israel dan negara Arab-Palestina, tidak dihiraukan oleh semua pihak. Bahkan Trans Yordania pernah menduduki daerah Palestina dan Kota Jerusalem, yang sedianya akan menjadi negara Arab-Palestina tersendiri.

Sengketa Arab-Israel yang semula merupakan masalah lokal, lambat laun berkembang menjadi masalah regional dengan terlibatnya negara-negara Arab di sekitarnya, dan dewasa ini bahkan telah berkembang menjadi sengketa global dengan terikut-sertakannya negara-negara Super-powers yang berusaha untuk mempersenjatai 'anak-buahinya'. Pihak Uni Soviet memperlengkapi Mesir, Syria dan Irak dengan MIG 23, TU-22, dan Soud to Ground Missile. Sebaliknya Amerika Serikat untuk mengimbangi persenjataan pihak Arab telah memperlengkapi Israel dengan senjata-senjata termodern.

Saudi Arabia yang sebelumnya kurang aktif dalam persengketaan Arab-Israel berubah mengambil peranan aktif sejak tahun 1967 dengan didudukinya Mesjid Al Aqsi oleh Israel, sebuah mesjid keramat bagi umat Islam. Saudi Arabia yang semula merupakan pasar bagi senjata produksi Amerika Serikat dan Inggris,

sejak tahun 1974 juga menjadi pasar bagi senjata produksi Perancis dengan pembelian tank-tank, pesawat terbang dan missiles seharga £ 400 juta. Peranan aktif Saudi Arabia terutama dalam usahanya menggalang persatuan Arab. Raja Faisal almarhum mengambil peranan sangat besar dalam Konferensi Puncak Arab di Rabat-Maroko yang merupakan penyebab mengapa Raja Hussein dari Yordania bersedia menyetujui PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina. Hanya dengan adanya persetujuan Raja Faisal almarhum maka harga minyak dapat dinaikkan dan menjadi salah satu senjata politik yang ampuh.

Dari Rabat-Maroko dengan 'kemenangan'-nya mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina, Yassir Arafat selaku kepala PLO menuju ke New York untuk berpidato di depan Sidang Umum PBB dalam kedudukan setingkat dengan Kepala-kepala Negara anggota PBB yang lain. Dalam pidatonya Yassir Arafat menuntut supaya bangsa Palestina yang telah diusir dari kampung halamannya dapat dikembalikan ke kampung halamannya kembali. Yassir Arafat menggambarkan suatu bentuk Palestina Merdeka yang akan menampung semua penduduk baik Arab, Palestina, Yahudi, Kristen maupun Islam yang akan hidup rukun berdampingan secara damai. Nada pidatonya merupakan penguluran tangan untuk perdamaian, akan tetapi dalam nada yang sama dikatakannya pula bahwa bangsa Palestina akan terus berjuang bila cita-citanya tidak dapat tercapai dengan jalan damai. Mayoritas anggota PBB menyambut pidato Arafat dengan baik, akan tetapi dua aktor utama dalam persengketaan tersebut yaitu Israel dan Amerika Serikat menolak untuk mengadakan perundingan dengan Yassir Arafat.

Sebenarnya makna dari pidato Yassir Arafat adalah pembentukan sebuah negara "Palestina Mini", yang terdiri dari daerah Barat sungai Yordan ditambah dengan Jalur Gaza sebagai pangkal tolak perjuangan Palestina untuk kemudian hari. Daerah yang dituntut untuk Palestina Mini sebenarnya adalah daerah Arab sesuai dengan rencana pembagian Palestina menurut resolusi PBB tahun 1947. Rencana pembentukan negara Palestina Mini tersebut pada hakikatnya juga merupakan penghentian usaha Yordania untuk membentuk sebuah United Arab Kingdom yang meliputi daerah Yordania yang sekarang ditambah daerah Barat sungai Yordan dan Jalur Gaza di bawah satu pemerintahan yaitu Raja Hussein. Dan menolak juga usaha Israel untuk membentuk sebuah negara Federasi yang terdiri dari daerah Israel ditambah dengan daerah-daerah tersebut tadi.

Bangsa Palestina yakin bahwa dengan pendirian Palestina kini maka mereka akan mempunyai kesanggupan untuk membangun negara tersebut. Di Markas Besar PLO di Beirut sekelompok teknokrat telah mulai sibuk menyusun rencana pembangunan Palestina. Optimisme bangsa Palestina tersebut terdorong oleh keyakinan mereka bahwa negara-negara Arab yang kaya akan memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan Palestina Merdeka, dan juga didorong oleh semangat keberhasilan pasukan Arab merobos garis pertahanan Bar Lev dalam perang Oktober 1973 maupun kemenangan pasukan komando di Karameh pada tahun 1968. Optimisme tersebut diperkuat pula oleh pandangan bahwa Israel berhasil membangun dan mempertahankan dirinya karena bantuan yang kuat dari masyarakat Yahudi di Amerika Serikat, tetapi dengan adanya inflasi dan resesi dunia akhir-akhir ini maka bantuan tersebut akan mengendor. Kesemuanya ini memperkuat keyakinan bangsa Palestina bahwa perjuangan mereka akan berhasil.

VI. Penutup

Pertentangan Arab-Israel yang telah meluap dalam bentuk empatkali peperangan sebenarnya bertitik tolak dari saat kedatangan orang-orang Yahudi ke wilayah Palestina. Empat kali terjadi peperangan dan keempat-empatnya dihentikan melalui resolusi-resolusi PBB, namun tidak pernah tercapai penyelesaian dalam bentuk perjanjian perdamaian yang sebenarnya, karena terlalu banyak unsur yang harus diperhitungkan untuk mencapai konsensus bersama.

Pertikaian yang semula hanya terdapat di antara orang-orang Yahudi sebagai pendatang berhadapan dengan bangsa Palestina sebagai penghuni asli, kini telah meluas menjadi perang di antara negara-negara Arab di satu pihak dan negara Israel di pihak yang lain. Dan masing-masing pihak telah menarik salah satu dari super-powers sebagai 'God-father'-nya. Keadaan menjadi lebih kompleks dengan dipergunakannya minyak sebagai senjata strategis Arab sejak permulaan dasa-warsa 70-an. Perang Oktober 1973 dengan keberhasilan tentara Arab mendobrak garis pertahanan Bar Lev, walaupun kemudian tentara Israel berhasil memukul kembali, telah memberikan suasana baru dan memperlihatkan adanya kecenderungan-kecenderungan baru dalam skenario strategis di kawasan tersebut.

Perang Oktober 1973 telah menghidupkan kembali tekad serta kepercayaan kepada diri sendiri pada bangsa Arab untuk berjuang terus, namun dalam pemikiran yang lebih tenang itu muncul pula pemikiran-pemikiran pragmatis. Perekonomian Mesir yang telah lama menderita karena pertikaian tersebut mulai menjadi perhatian utama Presiden Sadat. Ketergantungannya terhadap Uni Soviet mulai dikurangi dan jalan ke arah Eropa Barat dan Amerika Serikat mulai dibuka. Mesir bersedia menerima penarikan mundur tentara Israel hanya sampai ke celah-celah strategis sebagai syarat untuk mencapai penyelesaian sementara dan Terusan Suez dibuka kembali untuk pelayaran internasional. Raja Husein dari Yordania dan Raja Khalid dari Saudi Arabia menunjang kebijakan moderasi ini sedangkan Yassir Arafat sebagai pimpinan PLO menyetujui agar daerah Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza diserahkan kepada mereka untuk dijadikan Palestina Merdeka.

Perkembangan skenario strategis telah menunjukkan bahwa pihak Arab bersedia menerima syarat-syarat minimal untuk mencapai perdamaian. Namun apabila usaha-usaha ke arah perdamaian gagal maka Arab tidak menutup kesediaannya untuk melakukan peperangan kembali. Demikianlah pernyataan dari pemimpin-pemimpin Arab, Presiden Anwar Sadat, Raja Husein maupun juga Yassir Arafat. Lanjutan dari skenario ini akan lebih banyak ditentukan dari sikap Israel dan Amerika Serikat terhadap Yassir Arafat dengan PLO-nya. Maukah Israel dan Amerika Serikat mengakui Yassir Arafat dengan PLO-nya yang membawahi 80% bangsa Palestina? Maukah Israel menyerahkan daerah Barat sungai Yordan dan Jalur Gaza kepada negara Palostina? Sampai sekarang tanda-tanda menunjukkan bahwa Israel tidak bersedia untuk melakukan hal itu, bahkan Israel telah mendirikan lebih kurang 50 perkampungan di daerah-daerah yang didudukinya, misalnya di Sinai, Ketinggian Golan dan di daerah Barat sungai Yordan. Apakah mungkin Israel akan menyerahkan kembali daerah tersebut?

Dapat diperkirakan bahwa dengan kondisi-kondisi kritis yang ada dewasa ini akan dapat membawa akibat bahwa mayoritas bangsa Palostina yang sampai sekarang masih mempercayai garis Yassir Arafat dengan moderasi dan tuntutan minimalnya, akan berubah lebih mempercayai bahwa penyelesaian masalah Palestina hanya akan dapat tercapai melalui jalan kekerasan. Hal ini berarti akan membuka jalan bagi pihak radikal, seperti George Habash dengan PFLP, Ahmed Jibril dengan PFLP-General Command-nya dan Hawatmeh dengan People's Democratic Front for the Liberation of Palestine untuk mengambil peranan lebih besar. Hawatmeh

sampai sekarang masih bergabung dengan Yassir Arafat, akan tetapi untuk membuktikan 'militansinya' gerakannya juga melakukan aksi teror seperti yang terjadi di Kaalot.

Pola tingkah laku (behaviour pattern) bangsa Palestina sebenarnya tidaklah militan. Pada waktu perang dunia I di mana Raja Husein dan Raja Saud berhasil digerakkan oleh Inggris untuk bergerak, maka bangsa Palestina tidak bereaksi. Pada waktu orang-orang Yahudi mulai berdatangan dan berjuta-juta orang Palestina terusir dari tempat tinggalnya, dan bahkan waktu perang Arab-Israel meletus mula kali bangsa Palestina belum menjadi unsur aktif. Nasib bangsa Palestina hanya menjadi motivasi pertikaian Arab-Israel. Baru sejak 1968 dengan peristiwa Karamleh, derap perjuangan bangsa Palestina mulai terlihat dan terdengar dengan nyata. Tahun 1974 di Rabat-Maroko dan di PBB di bawah Yassir Arafat bangsa Palestina mulai diakui oleh dunia sebagai bangsa yang berjuang.

Sikap keras Israel dengan melakukan serangan balasan ke arah Lebanon terhadap pangkalan-pangkalan perjuangan bangsa Palestina justru akan meningkatkan semangat juang bangsa Palestina dengan aksi-aksi terornya yang kemungkinan akan terus berlangsung dengan lebih hebat. Oleh karena itu walaupun sebagian pemeran utama yaitu Mesir dan Israel sudah mulai mengadakan pendekatan namun dapat diperkirakan bahwa kawasan Timur Tengah akan tetap merupakan kawah pergolakan dan kemungkinan meletusnya perang Arab-Israel ke-V tidak tertutup.

Karena itu tepatlah apabila Menteri Luar Negeri Indonesia di dalam konperensi Menteri-menteri Luar Negeri negara-negara Islam memperingatkan Israel untuk memperhatikan pendapat dunia yang telah dituangkan dalam resolusi-resolusi PBB dan Dewan Keamanan. Bahkan Presiden Ford dan Amerika Serikatpun telah berkali-kali mendesak agar Israel mengambil sikap lebih lunak agar dapat tercapai penyelesaian dan dihindarkan meletusnya perang Arab-Israel yang ke-V yang dapat melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konfrontasi langsung.

SUMBER-GUMBER HACAAN

Henry Cattan, Palestine, The Arabs and Israel, William Clowes and Sons, 1969, London and Beccles.

Sir Redaer Bullard, Britain and the Middle East, Hutchinson's University Library, 1951, Hutchinson's House, London W.1.

Yair Evron, The Middle East, Elek Books Limited, 1973,
The Gresham Press Ltd. W.S. England.

John Bulloch, The Making of a War, W & J Mackay Limited, 1974,
Chatham.

Eric Rouleau, Palestine Today, The Guardian, June 14, 21 and 28.

